



KR-Wahyu Imam Ibadi

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menaiki alsintan yang akan diserahkan kepada petani.

TINGKATKAN PERTANIAN SUKOHARJO Petani Dibantu Alsintan

SUKOHARJO (KR) - Penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) modern diminta dimaksimalkan sebagai upaya meningkatkan hasil panen pertanian. Keberadaan alsintan juga membantu mempermudah kerja petani. Pemkab Sukoharjo sudah memberikan fasilitas gratis alsintan kepada petani setiap tahun.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sabtu (12/4) mengatakan, sektor pertanian sekarang menjadi mendapat sorotan karena masuk program prioritas nasional penyediaan cadangan pangan pemerintah. Kabupaten Sukoharjo sendiri menjadi salah satu daerah penting penyangga pangan nasional. Hal itu terlihat dengan capaian keberhasilan petani terhadap tingginya angka produktivitas padi.

Bupati minta penggunaan alat modern dimaksimalkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Saat ini penanaman jagung juga sudah menggunakan alsintan untuk mempercepat proses. Semua sektor pertanian di Sukoharjo sudah menggunakan alat modern. Diharapkan, ke depan panen lebih meningkat dan petani makin sejahtera.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windaryatno minta petani yang sudah panen segera melakukan percepatan tanam padi. Percepatan tanam padi dilakukan, mengingat kondisi sekarang stok air melimpah. Di sisi lain juga mempercepat dan memastikan pemenuhan kebutuhan beras dengan meningkatkan stok pangan.

Menurutnya, Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo dalam mewujudkan program percepatan tanam padi selain mengandalkan pemenuhan air, juga menggunakan bantuan Alsintan. Dipastikan, semua alsintan yang dimiliki dapat berfungsi dan sudah digunakan petani. Juga dipastikan, semua alsintan yang dimiliki petani dapat berfungsi dengan baik dan maksimal.

Program percepatan tanam padi di Sukoharjo selain mengandalkan pemenuhan air, juga menggunakan bantuan alsintan untuk percepatan tanam padi. Semua alsintan juga sudah dicek dan dilihat secara langsung penggunaannya oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo. **(Mam)-f**

UNTUK SISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Perlu Edukasi Mitigasi Bencana



KR-Abdul Alim

Peserta didik SMPN 2 Jaten mengikuti pendidikan mitigasi bencana oleh BPBD Karanganyar.

KARANGANYAR (KR) - Para peserta didik, guru dan tenaga kependidikan perlu diedukasi dalam mitigasi bencana alam. Sebab, kalangan ini dianggap paling rentan terdampak. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Hendro Prayitno usai simulasi penanganan gempa bumi di SMPN 02 Jaten, Jumat (11/4).

Ratusan peserta didik diajari cara menyelamatkan diri dari tertimpa runtuhnya bangunan dan memadamkan kebakaran. Siswa juga diajak meningkatkan rasa peduli sosial. Saat terjadi bencana alam ataupun menghadapi kondisi kepanikan, mereka tak boleh ikut kalut. Namun harus mencari pertolongan dari kalangan profesional. Pengetahuan tentang pertolongan pertama juga diberikan langsung tim BPBD yang hadir mengenalkan peralatan kesiapsiagaan bencana. Misalnya penggunaan kain basah dan APAR untuk memadamkan kebakaran.

Hendro menyampaikan pula pentingnya peserta didik menghindari bencana di musim pancaroba. Angin puting beliung dan hujan lebat kerap menyertainya, sehingga tak bijak jika berteduh di bawah pohon rindang maupun papan reklame dan bangunan semi permanen. “Ini merupakan rangkaian Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang jatuh pada 26 April nanti. Tema dari pusat adalah Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” kata Hendro.

Sejumlah sekolah disasar pemberian sosialisas dan edukasi, khususnya Sekolah Dasar dan Menengah di lokasi rawan bencana alam tanah longsor, seperti di Jenawi, Tawangmangu, Jatiyoso dan Karangpandan. “Harapannya, semua sekolah dapat dikunjungi tim,” tandas Hendro.

Lebih lanjut Hendro mengatakan, pihaknya akan mengundang guru tiap UPT Dinas Pendidikan untuk mengikuti agenda trainee of trainer pendidikan mitigasi bencana di lingkungan sekolah. “Memang, tidak ada kurikulum mitigasi bencana di sekolah. Namun setidaknya kami memberi edukasi ke guru-guru agar informasi pentingnya ditularkan ke lingkungan sekolah,” ungkapnya. **(Lim)-f**

INVESTOR BARU PT SRITEX SANGAT DITUNGGU

Buruh Kena PHK Agar Bisa Kerja Lagi

SUKOHARJO (KR) - Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo berharap kejelasan buruh PT Sritex yang sudah melakukan tanda tangan kontrak segera dipekerjakan kembali. Sebab, sampai sekarang buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) belum dipekerjakan kembali. Selain itu, FPB Sukoharjo juga mendesak hak-hak para buruh segera diselesaikan.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno mengatakan pihaknya hingga saat ini masih melakukan pemantauan terhadap kondisi buruh terdampak PHK PT Sritex. Pemantauan juga dilakukan terkait dengan perkembangan rencana operasional pabrik setelah PT Sritex tutup.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo mengatakan, saat ini keberadaan investor baru PT Sritex merupakan hal yang sangat ditunggu. Sebab,

investor baru tersebut akan membuka kembali operasional PT Sritex, sehingga buruh yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dapat segera bekerja kembali.

Menurut informasi yang diterima FPB Sukoharjo, buruh terdampak PHK PT Sritex baru menerima pencairan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu hak pokok berupa pesangon dan THR Idul Fitri 2025 belum diterima. FPB Sukoharjo juga menerima informasi bahwa buruh terdampak PHK PT Sritex sudah melakukan tanda tangan kontrak. Namun sampai saat ini mereka masih dalam kondisi menganggur karena belum mendapat pekerjaan.

Menurut Sukarno, sampai saat ini FPB Sukoharjo masih melakukan komunikasi dengan serikat pekerja eks-buruh PT Sritex. Namun informasi yang diterima sangat terbatas. “Komunikasi masih kami lakukan dengan buruh dan serikat pekerja lama. Tapi informasi yang kami te-

rima terbatas. Apapun itu, hak buruh harus segera dipenuhi. Buruh terdampak PHK PT Sritex juga masih berharap bisa dipekerjakan kembali,” tandasnya.

Sukarno menambahkan, secara umum kondisi dunia kerja di Kabupaten Sukoharjo masih stabil. FPB Sukoharjo belum menemukan kejadian PHK dari industri

yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Setelah lebaran ini, para pekerja sudah kembali masuk kerja. “Belum ada PHK massal dari industri di Kabupaten Sukoharjo. Hanya di PT Sritex yang ada PHK. Bahkan beberapa pelaku usaha, khususnya industri padat karya, saat ini membuka lowongan kerja,” ungkapnya. **(Mam)-f**



KR-Wahyu Imam Ibadi

Pabrik PT Sritex di Sukoharjo mulai tampak ada aktivitas.

PETERNAK DIMINTA WASPADA

Muncul Ancaman Penyakit Lato-lato

TEMANGGUNG (KR) - Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) atau dikenal dengan istilah lato-lato menjadi ancaman peternak sapi dan kerbau menjelang Idul Adha. Sebab penyakit ini dapat menyerang hewan dalam waktu cepat dan mengakibatkan kematian.

Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jateng 3 Drh Esty Dwi Utami mengatakan penyakit lato-lato tidak menular pada manusia, tetapi sangat berbahaya bagi ternak. “Penyakit lato-lato bisa menyebabkan ternak mati dalam waktu singkat, sehingga menimbulkan kerugian,” jelas Esty Dwi Utami, Sabtu (12/4).

Menurutnya, penyebab

LSD adalah infeksi LSDV, yang merupakan bagian dari genus capripoxvirus dan famili poxviridae. Virus ini dapat menginfeksi hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Esti yang juga Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, mengatakan kasus lato lato mencuat di Bantul. Sampai saat belum ada temuan kasus lato-lato di

Temanggung dan sekitarnya. Meski begitu peternak tetap harus hati-hati, sebisa mungkin menghindari membeli ternak dari daerah terjangkit lato-lato.

Virus LSD, kata dia disebabkan melalui serangan pengisap darah seperti lalat nyamuk dan kutu spesies tertentu. Penularannya diantara hewan ternak dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Penularan secara

langsung terjadi jika sapi yang sehat terkena resi kulit air liur darah dan susu oleh sapi yang terinfeksi.

Sementara itu penularan secara tidak langsung bisa disebabkan karena penggunaan peralatan kandang dan jarum suntik yang terkontaminasi virus. Hewan yang terkena lato-lato akan menimbulkan gejala umum mengeluarkan kotoran mata dan hidung yang lebih banyak, penurunan produksi susu, demam tinggi yang bisa melebihi 41 derajat Celcius, munculnya nodul

yang keras atau benjolan dengan diameter 2 cm sampai 5 centimeter.

“Nodul ini terdapat di kepala, leher, tungkai, kaki ekor dan membuat sapi menjadi lemah dan sulit bergerak. Pada kasus yang serius, nodul dapat menutupi di hampir seluruh bagian tubuh dan dapat berubah menjadi lesi nekrotik dan ulserat jika tidak segera ditangani,” ungkap Drh Esty. Peternak agar segera melapor ke penyuluh, menteri hewan atau dinas peternakan, jika ada temuan penyakit lato-lato. **(Osy)-f**

TERIMA SUAP PEMILIHAN KADES PAW BERJO

Mantan Camat Ngargoyoso Dipecat

KARANGANYAR (KR)

- Mantan Camat Ngargoyoso WAP resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. Pemberhentian status WAP sebagai ASN berdasarkan putusan hakim, Rabu 5 Maret 2025. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, penyuapan dan gratifikasi terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) Berjo,

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar, Nur Aini Farida. “Iya, kami berhen-

tikan secara tidak hormat sebagai pegawai ASN Pemkab Karanganyar,” tegasnya, Jumat (11/4). Menurutnya, pemberhentian secara tidak hormat itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nur Aini menuturkan, dasar pemberhentian WAP sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juncto pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN juncto pasal 17 ayat (10) huruf b Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.

“Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan,” tandas Nur Aini.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Camat Ngargoyoso WAP divonis

pidana penjara 2,6 tahun dan pidana denda ratusan juta rupiah oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang, Rabu (5/3). Terdakwa ditetapkan menjadi terpidana setelah melakukan penyuapan dan gratifikasi terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) Berjo tahun 2024.

Kasi Pidsus Kejari Karanganyar, Hartanto mengatakan WAP telah diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim karena telah menerima uang suap dari Agung Sutrisno senilai Rp 285 juta. “Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor karena telah menerima suap

terkait Pilkades Pergantian Antar Waktu Desa Berjo dengan nilai ratusan juta rupiah,” jelasnya.

Hartanto mengungkapkan, sidang dengan nomor perkara 88/Pid.Sus-TPK-/2024/PN Smg memberikan vonis kepada mantan Camat Ngargoyoso dengan pidana penjara selama 2,6 tahun dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan. Selain itu, mantan Camat Ngargoyoso juga diminta membayar uang pengganti Rp 266 juta subsidair 1 tahun penjara. “Vonis tersebut kemudian dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan,” tambahnya. **(Lim)-f**

PERMINTAAN DPRD SUKOHARJO KE DISHUB

Kendaraan Langgar Tonase Ditindak



KR-Wahyu Imam Ibadi

Kondisi jalan di wilayah Grogol, padat kendaraan.

besar dan membawa muatan berat. “Petugas yang mengawasi akan mengetahui hal tersebut di lapangan dan bisa melakukan pencegahan pelanggaran,” tandas Nurjayanto.

Selain itu, penting juga dilakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran tonase. Hal ini sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus memberi efek

jera bagi pelaku pelanggaran. “Sudah ada pengelompokan kelas jalan sesuai jenis kendaraan. Kendaraan berukuran besar dan muatan berat tentunya tidak mungkin melintas di jalan yang bukan kelasnya. Apabila dipaksakan, dampaknya terjadi kerusakan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dishub Sukoharjo Toni Sri Buntoro me-

ngatakan, sistem pengawasan sudah dilakukan bersama antara Dishub Sukoharjo dengan Satlantas Polres Sukoharjo. Petugas turun melakukan pengawasan diberbagai wilayah. Sasarannya yakni kendaraan berukuran besar dan muatan berat. Pemeriksaan dilakukan salah satunya menyangkut kelengkapan dokumen dan kelayakan kendaraan.

“Sudah dilakukan pengawasan dan penindakan. Permasalahannya kendaraan yang disasar tersebut sering melintas disaat petugas tidak sedang melakukan pengawasan,” ujarnya. Pelanggaran tonase kendaraan memang menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Selain itu, faktor lainnya yakni tingkat kepadatan arus lalu lintas kendaraan di wilayah.

Koordinasi juga sudah dilakukan berupa sosialisasi kepada pelaku usaha dan industri yang menggunakan kendaraan angkut berukuran besar dan muatan berat. Mereka diminta menggunakan jalan sesuai dengan jalur yang telah disediakan. **(Mam)-f**